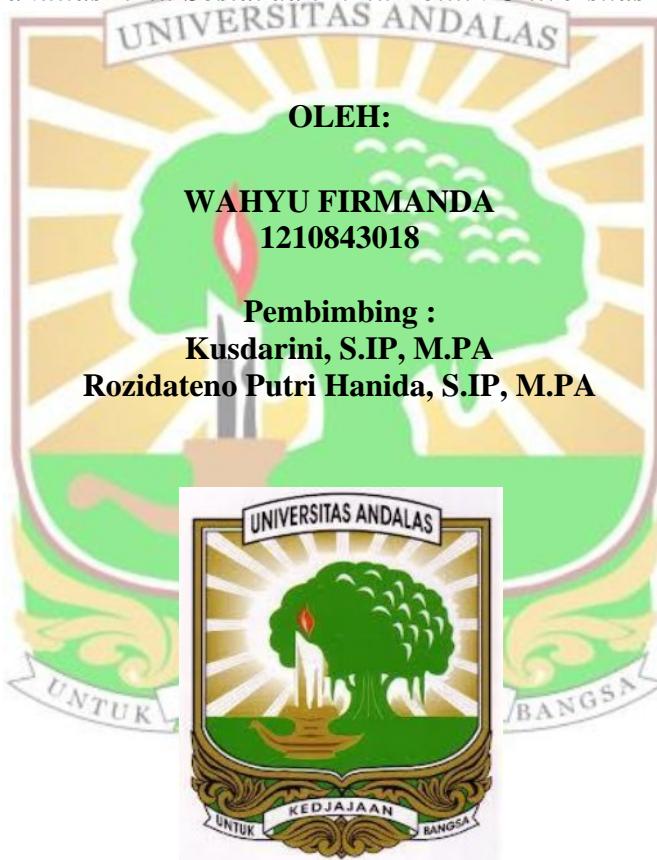


# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG**

## **SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

## ABSTRAK

**Wahyu Firmando, 1210843018, Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2017. Dibimbing oleh: Kusdarini S.IP, M.PA, dan Rozidateno Putri Hanida S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 171 halaman dengan referensi 10 buku teori, 5 buku metode, 1 skripsi, 1 artikel, 7 kebijakan, 3 dokumen dinas, 4 website internet.**

Dalam rangka penataan kota dipengaruhi oleh keberadaan dari sektor formal dan informal. Pedagang kaki lima (PKL) adalah alternatif mata pencaharian dan merupakan salah satu bentuk kegiatan dari sektor informal yang menggunakan fasilitas umum dan dianggap menjadi masalah bagi pemerintah. Untuk dalam rangka menciptakan kondisi pasar yang tertib, bersih, indah, aman dan nyaman, Pemerintah Kota Padang telah membuat dua buah kebijakan yakni berupa peraturan daerah dan surat keputusan walikota dan dilimpahkan kepada Dinas Pasar Kota Padang. Kebijakan tersebut semakin menjadi menarik ketika masih ada dijumpai PKL yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang sudah dapat dikatakan berjalan baik. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi oleh implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi oleh implementor terjadi pada variabel standar dan sasaran kebijakan yaitu kurang efektifnya sosialisasi. Kendala berikutnya adalah pada variabel sumberdaya yakni pada indikator sumberdaya non-manusia yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan penataan pedagang kaki lima di pasar raya padang dan keadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dinilai masih kurang. Sehingga dengan keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi pedagang belum dapat mengubah pola pikir dari pedagang tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

## ABSTRACT

**Wahyu Firmando, 1210843018, Policy Implementation Street Vendors in Pasar Raya Padang, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2017. Taught by: Kusdarini S.IP, M.PA, and Rozidateno Putri Hanida S.IP, M.PA. This thesis consists Of the 171 page with References 10 book theory, 5 books method, 1 thesis, 1 article, 7 policy, 3 official documents, 4 internet sites.**

In order arrangement of the city affected by the presence of formal and informal sectors. Street vendors (PKL) is an alternative livelihood and is one of the activities of the informal sector which uses a common loading facility and is considered to be a problem for the government. For in order to create an orderly market conditions, clean, beautiful, safe and comfortable, Padang City Government has made three policies in the form of local regulations and decrees delegated to the mayor and Dinas Pasar Padang City. The policy is increasingly becoming attractive when they last encountered vendors who violate these rules. Based on this phenomenon, researchers interested in reviewing the implementation of planning policies street vendors (PKL) in Pasar Raya Padang.

In this study, researchers used a qualitative research method with descriptive design. Researchers examined the merger policy by using the theory of policy implementation Van Meter and Van Horn. Researchers use are primary data and secondary data were collected by interview and documentation, and then analyzed using interactive analysis by Miles & Huberman.

The results showed that the implementation of planning policies street vendors (PKL) in Pasar Raya Padang has to be said well. Nonetheless, that does not mean there are no constraints faced by the implementor in the implementation of the policy. The constraints faced by the implementor occur on standard variable and targeted policies, namely the lack of effective socialization. The next obstacle is the variable resource that is in non-human resource indicators, namely the absence of a specific budget for planning activities of street vendors in Pasar Raya Padang facilities and infrastructure to support activities is insufficient. So with the budget constraints led to the social environment and economic traders can not change the mindset of the trader.

Keywords: Implementation, Policy, Planning Street Vendors